

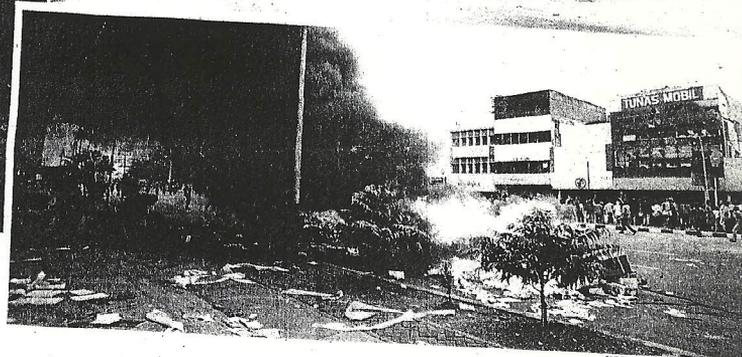
Jaga Kepercayaan terhadap Demokrasi

Sejumlah perbaikan telah terjadi selama 20 tahun perjalanan era Reformasi. Salah satu pekerjaan rumah yang mendesak diselesaikan ialah mengatasi kesenjangan ekonomi.

KOMPAS, 21/05/18.



KOMPAS/RONY AHYANTO NUGROHO



KOMPAS/ARBAIN RAMBEY

Suasana kawasan yang pernah menjadi tempat terjadi kerusuhan saat reformasi 1998 di Jalan Samanhudi, Jakarta, Minggu, 20 Mei 2018 (atas). Penjarahan dan pembakaran toko-toko terjadi di sejumlah tempat di Jakarta, termasuk di Jalan Samanhudi, Jakarta, Kamis (14/5/1998).

JAKARTA, KOMPAS — Memasuki dua dekade era Reformasi, sejumlah indikator menunjukkan Indonesia secara umum mengalami perbaikan pada sektor sosial, ekonomi, dan politik. Namun, kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang cenderung tetap tinggi pada dua dekade terakhir membuat Indonesia menghadapi ancaman laten terkikisnya rasa saling percaya di masyarakat yang berpotensi menggoyang kohesi sosial.

Salah satu capaian Indonesia selama 20 tahun terakhir dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika tahun 1999-IPM Indonesia ada di angka 64,30, pada tahun 2017 telah ada di angka 70,81. Posisi ini membuat Indonesia masuk dalam negara dengan IPM tinggi.

IPM kategori tinggi berada di kisaran 700,00-79,99. Semakin tinggi angka indeks, semakin baik kualitas hidup manusia,

Indeks Status Demokrasi Global dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) juga menunjukkan, Indonesia membaik di semua indikator pada kurun waktu



BACA JUGA HLM 2-3, & 5

1998-2015. Pada indikator pemerintahan perwakilan, nilai Indonesia naik dari 0,40 (1998) menjadi 0,71 (2015). Hal yang sama terjadi pada indikator hak asasi (dari 0,42 jadi 0,57), pengenda-

lian pemerintah (0,37 jadi 0,61), dan administrasi imparial (0,31 jadi 0,45). Semakin mendekati angka 1, semakin baik capaian sebuah negara.

Namun, kesenjangan di Indonesia juga makin lebar. Rasio gini Indonesia yang pada tahun 1999 di 0,311 pernah menembus 0,413 pada 2012 dan kemudian 0,414 di tahun 2014. Angka itu lalu sedikit turun dalam tiga tahun terakhir, menjadi 0,391 pada September

(Bersembung ke hlm 15 kol 1-2)

Indonesia dalam 20 Tahun Reformasi

Indikator	1998	2017
Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS	14.900 (Juni)	13.548 (Desember)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	-13,13	5,07
Inflasi (%)	77,60	3,61
Persentase Penduduk Miskin (%)	24,20	10,12
Cadangan Devisa (miliar dollar AS)	23,61	130,19
Rasio Gini	0,311*	0,391
Indeks Pembangunan Manusia	64,30*	70,81
Indeks Persepsi Korupsi	Skor 2	Skor 37
	(Skala 0-10)	(skala 0-100)
	Peringkat ke-80	Peringkat ke-96
	dari 85 negara	dari 180 negara
Indeks Demokrasi Indonesia	67,30**	70,09***

*Kondisi 1999 **Kondisi 2009 ***Kondisi 2016

Sumber: Litbang Kompas/PUR/ST/TPN/GI/L04/L05. Diolah dari BPS, Bappenas, Bank Indonesia, CEIC, dan Transparency International.



INFOGRAFIK DIMAS

20 TAHUN REFORMASI

Menagih Ingatan Kolektif Bangsa

Sanduk dan bendera merah putih dikibarkan saat momen-momen penting perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Namun, sampai saat ini, belum ada peringatan formal dari negara terhadap peristiwa reformasi 1998. Padahal, peristiwa saat itu juga jadi bagian penting dari perjalanan Indonesia. Wajah Indonesia saat ini juga dipengaruhi peristiwa 1998.

Di tengah minimnya perhatian negara, ingatan sosial terhadap reformasi 1998 tetap dipelihara oleh sejumlah kalangan, seperti perguruan tinggi, dengan menyelenggarakan upacara, membuat monumen, atau tugu peringatan.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Hubungan Masyarakat Universitas Trisakti Rully Besari Budiyanti mengatakan, setiap 12 Mei, Kepresidenan Mahasiswa selalu menggelar acara peringatan, baik melalui renungan semalam sebelumnya maupun upacara saat hari-H.

Acara ini sedikit banyak membangun ingatan individu. Adit Rasyid (22), mahasiswa semester VI Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, masih berumur dua tahun ketika reformasi terjadi tahun 1998. Namun, ia paham bahwa kampusnya disebut Kampus Reformasi.

Aryo Salomo, mahasiswa semester IV Program Diploma IV Jurusan Ilmu Keuangan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, menambahkan, setiap mahasiswa pernah

(Bersembung ke hlm 15 kol 1-7)



KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Pengunjung berkeliling menyaksikan koleksi Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (20/5/2018). Menjelang 73 tahun Indonesia Merdeka dan melewati 20 tahun masa reformasi, Indonesia telah dipimpin oleh tujuh presiden.

Pengantar Redaksi

Peringatan 20 tahun era reformasi menjadi momentum untuk melihat perjalanan bangsa Indonesia. Terkait hal itu, harian *Kompas* menggelar diskusi bertema "20 Tahun Reformasi, Pelajaran Belum Selesai" pada 7 Mei lalu. Hadir sebagai narasumber adalah Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siraj, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya A Prasetyantoko, dan pengajar Sosiologi Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet. Laporan dari diskusi ini akan disajikan dalam tiga tulisan, mulai hari ini.



Dua puluh tahun lalu, banyak orang bersukacita saat Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden Republik Indonesia. Euforia muncul di sejumlah tempat. Secercah harapan menyeruak.

Setelah ini, Indonesia akan bangkit menjadi negara demokrasi yang masyarakatnya adil dan makmur. Orde Baru telah berlalu, kini saatnya Era Reformasi. Begitu kira-kira imaji yang ada saat itu. Imajinasi politik yang berlandaskan pada hipotesis, berakhirnya Orde Baru akan membuat segalanya bisa dimulai dengan lebih baik.

Namun, sampai saat ini, pertanyaan tentang Indonesia yang adil dan makmur itu masih saja

muncul karena belum sepenuhnya dirasakan. Jika demikian, di mana salahnya?

Berbagai analisis, baik pesimistik maupun yang optimistik tentang Indonesia, kerap muncul di setiap bulan Mei. Analisis itu sejalan dengan romantika generasi reformasi tentang pencapaiannya di tahun 1998. Berbagai diskusi, dan pertemuan ak-

tivis 1998 digelar untuk mengenang nostalgia yang terjadi.

Tidak perlengkapan

Reformasi 1998 adalah suatu peristiwa. Hal ini berbeda dengan Orde Baru yang merupakan sistem. Selama 32 tahun Orde Baru telah dikembangkan institusi politik yang monolitik.

Sebagai sebuah peristiwa, reformasi memang berhasil menjadi sebuah kanal yang merangkul semua kekuatan politik untuk berfokus pada penjatihan Soeharto. Namun, sifatnya yang sebagai sebuah peristiwa, gerakan reformasi tidak melengkapi dirinya dengan peralatan kekuasaan pasca-berakhirnya kekuasaan Soeharto. Begitu Orde Baru berakhir, tidak ada proses sistemik yang mengikuti reformasi gagal diinstitutionalisasi.

Akibatnya, saat Orde Baru berakhir, terjadi kekosongan secara politik. Ini karena para penggiat gerakan reformasi memang minim agenda politik.

Kekosongan ini lalu diisi oleh kelompok lama, sejumlah elite Orde Baru yang kemudian berganti muka. Mereka ini yang kemudian mengambil alih agen-

da politik reformasi. Di titik ini yang dihadapi adalah realitas, bukan hanya romantika.

Ada sejumlah hal prinsip yang gagal direformasi pasca-berakhirnya Orde Baru pada 1998. Pertama, tidak ada sanksi terhadap partai dan organisasi yang selama Orde Baru berkuasa terlibat dalam operasi-operasi kekuasaan rezim tersebut. Kekuatan-kekuatan itu masih bermain bebas dalam matriks politik reformasi. Kedua, sulit menetapkan agenda keadilan transisional. Hingga hari ini, sejumlah korban dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu, setiap hari Kamis masih menggelar aksi berdiri di depan Istana Merdeka, untuk menuntut penyelesaian kasus mereka.

Di awal era reformasi, memang ada yang membuat garis antara kaum elite di kekuasaan Orde Baru dengan para penggiat reformasi. Wacana yang saat itu muncul dengan istilah reformasi total ini bersanding dengan wacana reformasi damai. Namun, waktu akhirnya membuktikan, kini sudah tak ada lagi jarak antara para mantan elite Orde Baru dan penggiat reformasi

1998. Relativisme dalam politik, turut mendorong para penggiat reformasi, kini tersebar di berbagai lembaga politik dengan bersama dengan para mantan elite Orde Baru.

Demokrasi

Namun, demokrasi Indonesia telah sampai pada titik di mana tidak ada jalan kembali. Dari sisi ini, Indonesia bisa dipandang sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang relatif sukses dengan demokrasi.

Reformasi, dalam derajat tertentu, juga berhasil mengubah sistem. Mulai dari dicabutnya dwi fungsi ABRI, kebebasan pers dan kebebasan berserikat, hingga menguatnya berbagai institusi seperti Komnas HAM. Tentu pencapaian-pencapaian ini masih terus dievaluasi lagi hingga ke tataran aturan dan implementasi yang paling teknis.

Sejumlah pencapaian tersebut terjadi antara lain karena Indonesia memiliki masyarakat sipil yang dinamis, baik dalam bentuk ormas besar, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, atau berbagai lembaga

swadaya masyarakat. Hal ini menjadikan demokrasi di Indonesia sebagai tradisi.

Kini yang masih harus diperbaiki adalah penguatan budaya politik. Jangan sampai terus-menerus ada kegaduhan politik. Ada indikasi, budaya demokrasi bahkan belum tumbuh sepenuhnya terutama di lingkungan partai politik. Kultur oposisi bahkan masih lemah, di mana kritik hanya berdasarkan sentimen, bukan kritik yang rasional. Legislatif dan eksekutif yang berhadapan menciptakan sistem yang menginisiasi korupsi.

Politik warga juga harus dikuatkan. Salah satunya dengan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan tidak hanya soal kewarganegaraan, tetapi juga soal demokrasi, identitas nasional, Pancasila, jender, dan HAM. Nilai-nilai ini yang tidak bisa lepas dari praktik demokrasi sehari-hari.

Bersama-sama dengan pembangunan institusi, niscaya demokrasi di Indonesia akan bisa tumbuh dan juga menghasilkan masyarakat yang adil dan makmur.

Semoga...
(EDNA C PATTISINA)

Menagih Ingatan Kolektif Bangsa

(Sambungan dari halaman 1)

mendapatkan penjelasan mengenai tragedi itu saat pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru (PPSMB). Bahkan, setiap mahasiswa baru juga diajak ke Museum Tragedi 12 Mei Trisakti yang terletak di dalam kampus. Oktober 2014, Pemprov DKI membangun Tugu 12 Mei di depan kampus Trisakti.

Selain Museum Tragedi 12 Mei di dalam kampus Universitas Trisakti, Pemprov DKI juga menamai dua halte bus transjakarta di Grogol dengan nama Halte 12 Mei Reformasi. Namun, Februari lalu pernah terjadi kehebohan di Trisakti karena tiba-tiba kata-kata "12 Mei Reformasi" hilang. Setelah diperjuangkan pihak kampus, nama itu kembali lagi.

Di kampus Universitas Airlangga, Surabaya, sejak 2005,

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) berusaha mendirikan monumen bingkai kosong yang dipegang perempuan dan laki-laki. Monumen ini untuk memperingati dua mahasiswa FISIP Unair yang hilang dalam perjuangan reformasi, yaitu Herman Hendrawan dan Bimo Petrus. "Ada resistensi dari birokrasi kampus," kata Dandik Katjasungkana dari IKOHI yang juga teman sekelas Herman.

Memudar

Ingatan kolektif masyarakat pun memudar. Demikian juga dengan ingatan individu. Adit Rasyid, misalnya, hafal nama mahasiswa yang gugur dalam peristiwa 12 Mei 1998 di kampus Trisakti. Namun, ia tidak tahu apa yang diperjuangkan mereka. Aryo Salomo juga hanya ingat samar-samar.

"Memang tidak ada upaya pe-

merintah untuk menempatkan reformasi 1998 ini sebagai titik penting. Orang-orang yang berkuasa saat ini bisa dibilang banyak yang asalnya juga dari Orde Baru," kata Haris Azhar, mantan Koordinator Kontra-

Tidak jauh dari Trisakti ada bangunan Plaza Slipi Jaya. Tahun 1998 terjadi penjarahan di mal ini, yang berujung perusakan dan pembakaran oleh sege-lintir orang tidak dikenal. Peristiwa itu terjadi bersamaan dengan maraknya demonstrasi di Trisakti sehingga mahasiswa tidak bisa keluar kampus.

Hari ini, Plaza Slipi Jaya menjadi salah satu tempat nongkrong warga. Salah seorang pengunjung, Amalia Nurul (34), mengatakan, dirinya termasuk lumayan sering datang ke Plaza Slipi Jaya. Dalam seminggu, ia bisa dua atau tiga kali ke pusat perbelanjaan itu untuk berkum-

pul dengan teman-temannya. Namun, ia tak tahu pada 1998 tempat itu pernah terbakar. "Saya kaget, malah baru tahu ini pernah kebakaran dan sampai penjarahan," ujar Amalia.

Hal senada dikatakan pengunjung lain asal Tomang, Jakarta Barat, Mardian Susanto (39). Saat peristiwa Mei 1998 bergejolak, dia sedang berkuliah di Bandung sehingga tidak begitu mengikuti isu di Jakarta. "Saya tahu saja Jakarta ramai penjarahan, tetapi tidak tahu detail tokonya mana saja," ucap pria yang biasa dipanggil Dian ini.

Hilangnya ingatan kolektif tentang peristiwa 1998 juga terjadi di Mal Citra Klender, yang dulu bernama Plaza Sentral Klender/Yogya Plaza Klender. Tempat ini juga dijarah dan terbakar. Tim Forensik FKUI-RS-CM memastikan jumlah korban

tewas sebanyak 90 orang. (*Kompas*, 18 Mei 1998)

Yanto (47), salah satu pengunjung, mengaku tahu bahwa Mal Citra Klender pernah terbakar. Namun, ia tidak tahu kalau ternyata saat itu terjadi juga penjarahan besar-besaran, bahkan hingga memakan puluhan korban. Sahroni (40), salah satu petugas satpam Mal Citra Klender, menuturkan, sisa-sisa kebakaran sudah tidak ada. Bangunan mal telah direnovasi sekitar dua tahun setelah kebakaran. "Saya tahu saat itu rusuh, tetapi tidak tahu kenapa sampai bisa rusuh, apalagi sampai ada puluhan yang tewas terbakar di dalam," ujar Yanto.

Ingatan akan reformasi penting karena sebuah bangsa dibentuk oleh pengalamannya akan peristiwa. Pemaknaan akan sejarah dilakukan berdasarkan ingatan, baik yang diwariskan

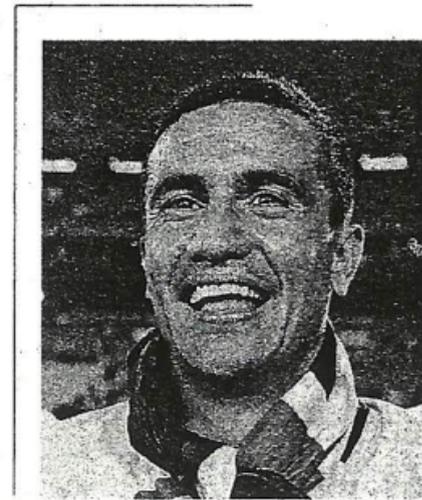
maupun yang ditafsirkan berdasarkan pengalaman hari ini.

Selama 20 tahun, seperti tak ada upaya serius untuk mengingat bahwa pada 1998 pernah ada upaya serius dari rakyat untuk menjadikan Indonesia antara lain bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta membuat negara lebih berpihak ke-

pada rakyat.

Akhirnya, yang kini terjadi adalah oknum DPR dan pemerintah bertransaksi menghasilkan korupsi KTP elektronik yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun, TKI diperas, dan berbagai kasus korupsi lainnya.

(NIKOLAUS HARBOWO/
EDNA C PATTISINA)



GETTY IMAGES

Pembetulan

Pada rubrik Songsong Rusia 2018 di halaman 31 edisi Minggu (20/5/2018) terdapat kesalahan foto. Seharusnya yang terpasang pemain tim nasional Australia, Tim Cahill (foto di samping), tetapi terpasang foto pemain tim nasional Inggris, Gary Cahill. Demikian kesalahan kami perbaiki. Terima kasih.

Redaksi